PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT MENGENAI JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Ikhwanul Kiram
NPP. 33.0024
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: kiramikh05@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Gede Bhayu Dananjaya, S.H., M.Si
Email: gedebhayu@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The increase in online gambling in Banda Aceh has become a social issue affecting public order, religious values, and the socio-economic condition of the community. Although Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law provides a formal legal basis for controlling gambling, studies that specifically examine the operational role of Satpol PP in enforcing the qanun against online gambling remain limited. This gap is important because online gambling is increasingly technology-based, difficult to detect, and requires institutional adaptation in terms of supervision, coordination, and law enforcement strategy.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit in enforcing the Jinayat Qanun regarding online gambling in Banda Aceh City.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive approach and applies the role theory of Biddle and Thomas. Data were collected through in-depth interviews with Satpol PP and Wilayatul Hisbah officers, related officials, and community leaders, supported by field observation and documentation of regulations, institutional reports, and case archives. Data analysis was conducted interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing with continuous verification.* ***Result:*** *The findings show that Satpol PP and WH have a clear legal foundation and institutional authority in enforcing the Jinayat Qanun concerning online gambling, but implementation has not yet been optimal. The main obstacles include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, limited technological capability, and low public legal awareness. The study also finds that law enforcement has been supported by socialization, routine control operations, and cross-agency coordination, although these efforts still need to be strengthened in practice.* ***Conclusion:*** *The role of Satpol PP in enforcing the Jinayat Qanun regarding online gambling in Banda Aceh has been carried out, but it still needs improvement in operational procedures, personnel capacity, technological support, and consistency in sanction enforcement so that the implementation of the qanun becomes more effective and adaptive to digital violations.*

Keywords: *Online Gambling; Qanun Aceh; Role; Satpol PP and WH.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Peningkatan praktik judi online di Kota Banda Aceh telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak pada ketertiban umum, nilai-nilai keagamaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menjadi dasar hukum formal, kajian yang secara khusus membahas peranan operasional Satpol PP dalam penegakan qanun terhadap judi online masih terbatas. Kesenjangan ini penting karena judi online memiliki karakter digital, sulit dideteksi, dan menuntut kesiapan kelembagaan, koordinasi, serta strategi penegakan hukum yang lebih adaptif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teori peran Biddle dan Thomas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, pejabat terkait, dan tokoh masyarakat, yang diperkuat dengan observasi lapangan serta studi dokumentasi terhadap qanun, regulasi daerah, laporan kegiatan, dan arsip kasus. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berkelanjutan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH memiliki dasar hukum dan struktur kelembagaan yang memadai dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penegakan telah dilakukan melalui sosialisasi, operasi penertiban rutin, dan koordinasi lintas instansi, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui perbaikan prosedur dan penguatan kapasitas aparat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh telah dijalankan, tetapi masih perlu penguatan pada aspek prosedur operasional, kapasitas personel, dukungan teknologi, dan konsistensi penerapan sanksi agar penegakan qanun lebih efektif dan adaptif terhadap pelanggaran berbasis digital.

Kata kunci: Judi Online; Peranan; Qanun Aceh; Satpol PP dan WH.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik judi online di Kota Banda Aceh berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital, kemudahan akses internet, dan penggunaan perangkat seluler yang semakin luas. Kondisi ini menjadikan judi online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak pada ketertiban umum, moralitas, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal, persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan penegakan norma agama melalui Qanun Hukum Jinayat.

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah memiliki posisi strategis dalam penegakan qanun di tingkat daerah. Keduanya bukan hanya menjalankan fungsi penertiban, tetapi juga fungsi preventif, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelanggaran syariat di masyarakat. Dalam kasus judi online, peran ini menjadi semakin penting karena bentuk pelanggaran tidak lagi selalu tampak secara fisik, melainkan bergerak ke ruang digital yang lebih sulit diawasi dan dibuktikan.

Naskah skripsi menunjukkan bahwa praktik judi online di Banda Aceh masih menjadi tantangan nyata bagi penegakan hukum daerah. Di satu sisi, kewenangan normatif dan landasan hukum telah tersedia melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tetapi di sisi lain kapasitas teknis, dukungan teknologi, dan kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya memadai. Situasi ini menyebabkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap peranan Satpol PP dalam menghadapi pelanggaran berbasis digital tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan penelitian terletak pada terbatasnya pembahasan yang secara khusus menelaah peranan Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti penegakan hukum jinayat secara umum, peran kepolisian, atau Wilayatul Hisbah, sedangkan dinamika operasional Satpol PP dalam konteks pelanggaran digital belum dikaji secara mendalam.

Kesenjangan ini menjadi signifikan karena judi online memiliki karakter yang tersembunyi, mudah berpindah platform, dan memerlukan kemampuan teknologi serta koordinasi kelembagaan yang lebih kuat dibanding pelanggaran konvensional. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana peranan Satpol PP dijalankan, apa hambatan yang dihadapi, dan bagaimana langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan qanun.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris mengenai peranan Satpol PP dalam menghadapi pelanggaran Qanun Hukum Jinayat yang berbasis digital. Tanpa penelitian ini, pemerintah daerah dan instansi terkait akan kekurangan dasar analitis yang kuat dalam menyusun strategi penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan modus pelanggaran di lapangan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan kapasitas aparat dalam menghadapi judi online. Dari sisi akademik, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum dalam konteks daerah yang memiliki kekhususan syariat.

1.4 Penelitian Terdahulu

Perkembangan teknologi digital menuntut aparat penegak hukum untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *machine learning* dalam mendeteksi serta menindak praktik perjudian online secara lebih efektif. Kemampuan teknologi menjadi faktor penting dalam

keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital (Ashari, 2025). Perlindungan hukum masyarakat dari eksploitasi perjudian online memerlukan kolaborasi yang kuat antara regulasi, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat agar upaya pemberantasan dapat berjalan secara optimal (Abdullah, 2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang tegas, tetapi juga oleh konsistensi penerapan sanksi dan keadilan dalam proses penegakan hukum (Aungrah, 2025).

Pada tingkat nasional, keberhasilan pemberantasan judi online sangat dipengaruhi oleh sinergi antara Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Kepolisian. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas teknologi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum (Alidar et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa patroli siber, pemantauan transaksi digital, serta koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menekan angka perjudian online, meskipun aparat masih menghadapi berbagai kendala teknis akibat perkembangan teknologi yang semakin cepat (Bagaskara et al., 2024). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek penegakan hukum secara umum, peran kepolisian, maupun kerja sama antar lembaga dalam pemberantasan judi online. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan Satpol PP sebagai fokus utama analisis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas dalam mengkaji harapan, norma, pelaksanaan, evaluasi, dan sanksi dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap peranan Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh dengan menggunakan teori peran Biddle dan Thomas. Fokus tersebut memberikan sudut pandang yang lebih spesifik dibanding penelitian terdahulu yang cenderung melihat penegakan hukum jinayat secara umum atau menitikberatkan pada lembaga selain Satpol PP.

Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan karena menghubungkan persoalan penegakan qanun dengan tantangan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif kelembagaan, tetapi juga menganalisis bagaimana Satpol PP menghadapi perubahan karakter pelanggaran yang menuntut penyesuaian strategi, koordinasi, dan kapasitas teknis.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana peranan Satpol PP dijalankan dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online, termasuk

dinamika interaksi antar aparat, kendala lapangan, serta persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP, Wilayatul Hisbah, pejabat terkait, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses penegakan qanun terkait judi online. Selain itu, penelitian juga menggunakan observasi lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas aparat serta dokumentasi terhadap qanun, regulasi, laporan kegiatan, dan arsip kasus.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik agar informasi yang diperoleh lebih kredibel. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun temuan secara sistematis dan menjelaskan hubungan antara peranan Satpol PP, hambatan, dan upaya perbaikannya.

Penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh, khususnya pada institusi Satpol PP dan WH serta lingkungan yang berkaitan dengan penegakan qanun terhadap judi online. Lokasi ini dipilih karena Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang menghadapi perkembangan kasus judi online sekaligus menjadi ruang penerapan syariat Islam secara formal di tingkat daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Harapan terhadap Satpol PP dalam Penegakan Judi Online (*Expectation*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa terdapat harapan yang tinggi terhadap peran Satpol PP dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait praktik judi online. Harapan tersebut muncul karena Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan qanun serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Masyarakat mengharapkan Satpol PP tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menjaga nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Keberadaan Satpol PP dipandang penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang terbebas dari praktik perjudian online yang dinilai dapat merusak moral, mengganggu ketertiban umum, dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi agar Satpol PP mampu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap aktivitas perjudian online yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya tindakan yang konsisten terhadap setiap pelanggaran qanun sehingga tercipta kepastian hukum dan efek sosial yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Harapan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga dari pemerintah daerah yang menempatkan Satpol PP sebagai ujung tombak pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat di tingkat daerah. Dengan demikian, peran Satpol PP diposisikan sebagai representasi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban sosial dan pelaksanaan syariat Islam secara nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, harapan (*expectation*) merupakan tuntutan atau ekspektasi yang diberikan masyarakat kepada individu maupun organisasi berdasarkan kedudukan dan peran yang dimilikinya. Semakin strategis posisi suatu organisasi dalam sistem sosial, maka semakin besar pula harapan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya (Biddle & Thomas, 1966). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memperoleh harapan yang cukup besar karena secara normatif memiliki kewenangan untuk menegakkan qanun dan menjaga ketertiban umum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara konsep *expectation* dalam teori peran dengan realitas yang ditemukan di lapangan, dimana masyarakat menempatkan Satpol PP sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan menekan praktik judi online di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raynaldi dan Hutabarat (2022) yang menyatakan bahwa masyarakat Aceh menempatkan Satpol PP sebagai salah satu aktor utama dalam pelaksanaan syariat Islam dan pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Selain itu, penelitian Alidar et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap judi online sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap aparat penegak qanun. Dengan demikian, tingginya harapan masyarakat terhadap Satpol PP menjadi salah satu indikator bahwa lembaga tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menjalankan fungsi penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh.

Tabel 1.
Harapan Masyarakat terhadap Peran Satpol PP dalam Penegakan Judi Online di Kota Banda Aceh

No	Bentuk Harapan Masyarakat	Indikasi Temuan Lapangan
1	Pengawasan terhadap praktik judi online	Masyarakat mengharapkan Satpol PP melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aktivitas perjudian online
2	Penegakan qanun secara konsisten	Masyarakat menginginkan adanya tindakan yang sama terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan
3	Menjaga ketertiban umum	Satpol PP diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib
4	Menegakkan nilai syariat Islam	Masyarakat menilai Satpol PP sebagai representasi pemerintah daerah dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam
5	Memberikan kepastian hukum	Masyarakat mengharapkan adanya kepastian terhadap proses penegakan qanun yang dilakukan
6	Menjadi teladan dalam penegakan aturan	Satpol PP diharapkan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Penelitian, 2026.

Tabel tersebut dapat ditempatkan setelah uraian temuan lapangan karena berfungsi memperkuat hasil wawancara mengenai ekspektasi masyarakat terhadap peranan Satpol PP pada dimensi Harapan (Expectation). Ini sesuai dengan format repository IPDN yang umumnya menampilkan tabel pendukung pada setiap indikator pembahasan.

3.2 Norma Tindakan Satpol PP dalam Penegakan Judi Online (*Norm*)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh dilandasi oleh norma hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas tindakan aparat, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang mengatur bagaimana Satpol PP harus menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, aparat Satpol PP berpedoman pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat Satpol PP memahami tugas penegakan qanun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut tercermin dari pelaksanaan tugas yang mengedepankan prosedur hukum dan kewenangan yang telah ditentukan. Dalam konteks penegakan qanun mengenai judi online, norma hukum menjadi acuan utama bagi aparat dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan terhadap masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran. Dengan adanya norma yang jelas, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Aceh.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa norma yang mengatur pelaksanaan tugas Satpol PP tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai syariat Islam yang hidup di masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Satpol PP tidak semata-mata berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan qanun memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penegakan peraturan daerah pada umumnya karena mengandung dimensi religius yang kuat.

Menurut Biddle dan Thomas (1966), norma (*norm*) merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku pemegang peran agar sesuai dengan harapan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya. Norma berfungsi sebagai pedoman yang menentukan tindakan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh individu atau organisasi dalam menjalankan perannya. Dalam penelitian ini, norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai syariat Islam menjadi landasan utama bagi Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara teori peran dengan kondisi empiris di lapangan, dimana pelaksanaan tugas Satpol PP senantiasa mengacu pada norma yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Kholil (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum di Aceh sangat dipengaruhi oleh kepatuhan aparat terhadap norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penelitian Hadi dan Putra (2023) juga menjelaskan bahwa legitimasi penegakan hukum terhadap perjudian online bergantung pada kesesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangannya.

Dengan demikian, norma menjadi elemen penting yang membentuk dan mengarahkan peran Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.
Norma yang Menjadi Pedoman Satpol PP dalam Penegakan Qanun Hukum Jinayat Mengenai Judi Online

No	Norma/Pedoman	Substansi Norma	Relevansi terhadap Penegakan Judi Online
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam penerapan syariat Islam	Menjadi dasar pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengatur urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Menjadi dasar kewenangan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum
3	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP	Mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP	Menjadi pedoman operasional pelaksanaan tugas Satpol PP
4	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Mengatur berbagai jarimah, termasuk maisir (judi)	Menjadi dasar hukum utama penegakan terhadap judi online
5	Nilai-Nilai Syariat Islam	Norma sosial dan religius yang berkembang di masyarakat Aceh	Menjadi pedoman moral dalam pelaksanaan penegakan qanun
6	SOP dan Ketentuan Internal Satpol PP dan WH	Mengatur prosedur pelaksanaan tugas di lapangan	Menjamin kesesuaian tindakan aparat dengan prosedur yang berlaku

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Penelitian, 2026.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP tidak terlepas dari berbagai norma hukum dan norma sosial yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh. Dengan adanya pedoman yang jelas, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

3.3 Pelaksanaan Peran Satpol PP dalam Penegakan Judi Online (*Performance*)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh diwujudkan melalui serangkaian aktivitas yang mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki sebagai perangkat daerah penegak qanun. Pelaksanaan peran tersebut terlihat dari keterlibatan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam kegiatan pengawasan, sosialisasi qanun, penertiban, serta koordinasi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan praktik judi online. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga

berperan secara langsung dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pelaksanaannya, aparat Satpol PP melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi terjadinya aktivitas perjudian online, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan maisir dalam hukum Islam, serta melaksanakan tindakan sesuai prosedur yang berlaku ketika ditemukan indikasi pelanggaran qanun. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan adanya implementasi nyata dari kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP sebagai penegak qanun di daerah.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP juga mencerminkan tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Banda Aceh. Kehadiran aparat di tengah masyarakat memberikan pengaruh terhadap terciptanya kesadaran hukum serta memperkuat implementasi syariat Islam dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pelaksanaan peran tidak hanya dipahami sebagai tindakan penegakan aturan semata, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang bertujuan menjaga keteraturan sosial dan mewujudkan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurut Biddle dan Thomas (1966), *performance* merupakan perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu atau organisasi dalam menjalankan peran yang melekat pada kedudukannya. Pelaksanaan peran menjadi indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu menerjemahkan harapan dan norma ke dalam tindakan konkret. Dalam penelitian ini, berbagai aktivitas yang dilakukan Satpol PP menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan perannya sebagai penegak qanun melalui tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, pelaksanaan peran menjadi bukti nyata keberadaan Satpol PP sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Alidar et al. (2025) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap judi online memerlukan keterlibatan aktif aparat dalam kegiatan pengawasan dan penertiban di lapangan. Selain itu, penelitian Bagaskara et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tercermin dari kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan peran Satpol PP dalam penelitian ini menunjukkan adanya implementasi fungsi kelembagaan yang sesuai dengan mandat hukum dan harapan masyarakat dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.
Pelaksanaan Peran Satpol PP dalam Penegakan Qanun Hukum Jinayat Mengenai Judi Online di Kota Banda Aceh

No	Bentuk Pelaksanaan Peran	Deskripsi Temuan Lapangan
1	Pengawasan	Satpol PP melakukan pemantauan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat aktivitas judi online
2	Sosialisasi Qanun	Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai larangan maisir dalam Qanun Hukum Jinayat
3	Penertiban	Pelaksanaan tindakan sesuai kewenangan terhadap dugaan pelanggaran qanun
4	Pembinaan Masyarakat	Memberikan pemahaman hukum dan nilai syariat kepada masyarakat
5	Koordinasi Penegakan Qanun	Keterlibatan dalam pelaksanaan penegakan qanun bersama pihak terkait
6	Pengawasan Ketertiban Umum	Menjaga situasi masyarakat agar tetap tertib dan kondusif sesuai ketentuan qanun

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Penelitian, 2026.

Tabel 4.
Dokumentasi Kegiatan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Qanun Hukum Jinayat

No	Kegiatan	Bentuk Dokumentasi
1	Operasi penertiban di lokasi yang terindikasi praktik judi online	Dokumentasi lapangan Satpol PP dan WH
2	Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat	Dokumentasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan
3	Pengawasan dan patroli rutin	Dokumentasi kegiatan pengawasan lapangan
4	Koordinasi dengan instansi terkait	Dokumentasi rapat koordinasi dan kegiatan bersama
5	Pelaksanaan proses penegakan qanun	Arsip kegiatan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026.

Tabel 3. dan Tabel 4. menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang mencerminkan implementasi tugas dan fungsi kelembagaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dimensi *performance* telah terlihat melalui tindakan nyata yang dilakukan Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya sebagai penegak qanun di Kota Banda Aceh.

3.4 Evaluasi terhadap Peran Satpol PP (*Evaluation*)

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP telah memperoleh pengakuan sebagai institusi yang menjalankan fungsi penegakan qanun di tingkat daerah. Evaluasi tersebut didasarkan pada penilaian masyarakat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memandang Satpol PP sebagai lembaga yang memiliki

tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penilaian terhadap peran Satpol PP tidak hanya didasarkan pada keberadaan regulasi yang ditegakkan, tetapi juga pada bagaimana peran tersebut diwujudkan dalam aktivitas nyata di lapangan. Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pengawasan, sosialisasi, dan penertiban yang dilakukan Satpol PP merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, keberadaan Satpol PP dinilai memberikan rasa aman serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan Qanun Hukum Jinayat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Satpol PP telah memperoleh legitimasi sosial sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa evaluasi terhadap peran Satpol PP berkaitan erat dengan tingkat kesesuaian antara harapan masyarakat dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat. Semakin tinggi kesesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pelaksanaan peran yang ditunjukkan oleh Satpol PP, maka semakin positif pula penilaian yang diberikan. Dalam konteks penegakan qanun mengenai judi online, masyarakat menilai bahwa kehadiran Satpol PP memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan penerapan syariat Islam dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat Kota Banda Aceh.

Menurut Biddle dan Thomas (1966), *evaluation* merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh lingkungan sosial terhadap pelaksanaan peran yang dijalankan oleh individu maupun organisasi. Evaluasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana perilaku yang ditampilkan telah sesuai dengan harapan dan norma yang melekat pada suatu peran. Dalam penelitian ini, evaluasi masyarakat terhadap Satpol PP menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan perannya sebagai penegak qanun sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, evaluasi menjadi indikator yang menggambarkan tingkat penerimaan sosial terhadap pelaksanaan peran Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Raynaldi dan Hutabarat (2022) yang menyatakan bahwa legitimasi lembaga penegak syariat Islam di Aceh sangat dipengaruhi oleh persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan. Penelitian Fajar dan Lilis (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Satpol PP dapat dilihat dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah. Oleh karena itu, evaluasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan peran Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh.

Tabel 5.
Evaluasi Masyarakat terhadap Peran Satpol PP dalam Penegakan Judi Online di Kota Banda Aceh

No	Aspek Evaluasi	Hasil Temuan Lapangan
1	Pelaksanaan Tugas Penegakan Qanun	Satpol PP dinilai menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki
2	Kehadiran Aparat di Masyarakat	Masyarakat merasakan keberadaan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum
3	Pelaksanaan Sosialisasi	Satpol PP dinilai aktif menyampaikan informasi mengenai larangan judi online
4	Komitmen Penegakan Hukum	Masyarakat menilai Satpol PP memiliki komitmen dalam pelaksanaan qanun
5	Kontribusi terhadap Ketertiban Sosial	Keberadaan Satpol PP dinilai mendukung terciptanya ketertiban masyarakat
6	Implementasi Syariat Islam	Satpol PP dipandang sebagai bagian dari pelaksana syariat Islam di Aceh

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi Penelitian, 2026.

Tabel 6.
Rekapitulasi Penilaian Informan terhadap Peran Satpol PP Berdasarkan Dimensi Evaluasi

Dimensi Evaluasi	Indikator Penilaian	Kategori Temuan
Kesesuaian Peran	Pelaksanaan tugas sesuai kewenangan	Baik
Penerimaan Sosial	Tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP	Baik
Kontribusi Institusional	Peran dalam menjaga ketertiban umum dan syariat Islam	Baik
Akuntabilitas Peran	Pelaksanaan tugas sesuai aturan dan norma yang berlaku	Baik
Legitimasi Sosial	Kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP	Baik

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Analisis Data Penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online memperoleh penilaian positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran yang dijalankan telah sesuai dengan harapan sosial dan norma yang melekat pada kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah penegak qanun di Kota Banda Aceh.

3.5 Sanksi dalam Konteks Peran Satpol PP (*Sanction*)

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi sanksi dalam konteks peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya ketentuan hukum yang mengatur larangan praktik maisir (judi), termasuk judi online. Dalam pelaksanaan penegakan qanun, sanksi dipahami sebagai konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sebagai bentuk penegasan terhadap norma yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberadaan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap qanun memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dalam konteks tersebut, Satpol PP dipandang sebagai lembaga yang memiliki peran dalam mengawal proses penegakan qanun hingga pelanggaran yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan sanksi memberikan kepastian bahwa aturan yang telah ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, sanksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama dan hukum. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dipandang sebagai manifestasi kehadiran negara dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penertiban, tetapi juga menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap qanun memperoleh konsekuensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Biddle dan Thomas (1966), *sanction* merupakan konsekuensi yang diberikan kepada individu atau organisasi sebagai respons atas pelaksanaan suatu peran. Sanksi dapat berupa penghargaan apabila peran dijalankan sesuai harapan, maupun hukuman apabila terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku. Dalam penelitian ini, sanksi diwujudkan dalam bentuk konsekuensi hukum terhadap pelaku judi online sebagai upaya menjaga kepatuhan terhadap Qanun Hukum Jinayat. Dengan demikian, dimensi sanksi menunjukkan adanya hubungan antara norma, pelaksanaan peran, dan konsekuensi yang diterapkan dalam sistem sosial. Keberadaan sanksi memperkuat legitimasi Satpol PP sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penegakan qanun di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aungrah (2025) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online. Penelitian Hadi dan Putra (2023) juga menjelaskan bahwa keberadaan sanksi dalam sistem hukum memiliki fungsi untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku sekaligus memperkuat legitimasi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sanksi menjadi indikator penting dalam menilai pelaksanaan peran Satpol PP sebagai institusi penegak Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh.

Tabel 7.
Bentuk Sanksi dalam Qanun Hukum Jinayat Terkait Pelanggaran Maisir (Judi)

No	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi Menurut Qanun
1	Uqubat Cambuk	Hukuman cambuk sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
2	Uqubat Denda	Pembayaran denda dalam bentuk emas murni sesuai ketentuan qanun
3	Uqubat Penjara	Pidana penjara sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan
4	Sanksi Sosial	Konsekuensi sosial akibat pelanggaran norma agama dan hukum
5	Efek Hukum	Pencatatan pelanggaran dalam proses penegakan hukum jinayat

Sumber: Diolah dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2026.

3.6 Diskusi Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum terhadap judi online di Aceh tidak dapat hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi membutuhkan sinergi antara kekuatan hukum, kapasitas kelembagaan, dan penerimaan sosial. Dalam konteks ini, peran Satpol PP menjadi penting karena berada di titik temu antara pelaksanaan kebijakan daerah, pengawasan sosial, dan penegakan norma syariat.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan peran kepolisian atau penegakan syariat secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa Satpol PP memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar penertiban. Satpol PP juga berperan dalam membangun kepatuhan masyarakat melalui pendekatan sosial, pembinaan, dan koordinasi dengan lembaga lain, sehingga efektivitas perannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal dan kualitas jejaring antar-instansi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online tidak cukup ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan Satpol PP menyesuaikan cara kerja, prosedur, dan strategi penegakan dengan karakter pelanggaran digital yang terus berkembang.

3.7 Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan penting dalam skripsi adalah adanya hubungan yang erat antara keberhasilan penegakan qanun dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap nilai moral dan sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan kombinasi antara tindakan represif dan edukatif.

Temuan lain yang menarik adalah bahwa hambatan teknologi bukan sekadar persoalan alat, tetapi juga persoalan kompetensi aparatur. Dalam konteks ini, peningkatan kemampuan teknis aparat menjadi kebutuhan mendesak agar Satpol PP dapat bergerak lebih adaptif terhadap perubahan modus judi online yang terus berkembang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Satpol PP dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat mengenai judi online di Kota Banda Aceh telah dijalankan melalui fungsi pengawasan, sosialisasi, penertiban, dan koordinasi dengan lembaga terkait, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Agar penegakan qanun berjalan lebih efektif, diperlukan penguatan prosedur operasional, peningkatan kapasitas aparat, dukungan teknologi yang memadai, serta konsistensi dalam penerapan sanksi. Dengan langkah tersebut, Satpol PP diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih adaptif dalam menghadapi praktik judi online yang terus berkembang di era digital.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus lokasi yang hanya berada di Kota Banda Aceh dan pada ketergantungan terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia selama proses penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah kajian ke kabupaten atau kota lain di Aceh, membandingkan efektivitas penegakan antar daerah, atau memperdalam aspek kesiapan teknologi, koordinasi kelembagaan, dan model pembinaan sosial dalam penanganan judi online.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dosen pembimbing, aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pejabat terkait, para informan penelitian, keluarga, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2025). *The task of legal protection for Indonesian citizens from online gambling exploitation in the perspective of law enforcement in the digital era*. *Journal of Law, Politic and Humanities*. https://dinastires.org/JLPH/article/view/1947

Alidar, A., Putra, M., & Sari, F. (2025). *Pemberantasan judi online di Kota Banda Aceh*. *Syntax Idea, 7*(5). https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/12863

Ashari, D. A. (2025). *Reconception of the law enforcement towards online gambling in Indonesia through artificial intelligence approaches*. *Lexovate Journal*. https://journal-iasssf.com/index.php/Lexovate/article/view/1365

Aungrah, S. K. (2025). *Law enforcement against online gambling criminal acts in Indonesia based on the theory of justice*. *Journal of International Research in Public Law, 3*(1). https://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/376

Bagaskara, M. B. W., et al. (2024). *Peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi online di Provinsi Bali*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(3). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5036

Banks, J. (2014). *Online gambling and crime: Causes, controls and controversies*. Routledge.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kota Banda Aceh dalam angka 2025*. https://www.bps.go.id

Biddle, B., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. (2025). *Laporan statistik kasus judi online di Banda Aceh tahun 2019–2024*. https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/statistik-judi-online-2019-2024

Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong, 4*(1), 1–14. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/2445

Fajar, L. (2024). *Efektivitas penegakan qanun jinayat oleh Satpol PP di Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Rainy Banda Aceh.

Nuryani, R., Rohayatin, T., & Wulandari, W. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 1*(3). https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis-idealist/article/view/3445

Qindi, A. E. Al. (2024). Implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah di Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik), 4*(1), 95–105. https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.230

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong, 4*(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Rosadi, O., & Putra, I. (2025). Sinergitas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *UNES Journal of Swara Justisia, 9*(2), 320–329. https://doi.org/10.31933/ztv5ps23

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029. (2025). Pemerintah Kota Banda Aceh.

Suhendi, D. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong, 3*(1). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. IPDN Press.

Soekanto, S. (2010). *Penegakan hukum* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi terbaru). Alfabeta.

Young, M. (2011). Internet gambling addiction: The psychological impact. *Journal of Behavioral Addictions, 12*(1), 40–52. https://www.researchgate.net/publication/273951574.